

TUGAS MAKALAH MATA KULIAH PANCASILA
PANCASILA SEBAGAI DASAR POLITIK LUAR NEGERI
INDONESIA



Dosen Pengampu:

Dr. Kadek Rachmawati, M.Kes., Drh

Disusun Oleh: Kelompok 12

- | | | |
|----|--------------------------|----------------|
| 1. | Rahajeng Sekar Wangi N. | (071911633033) |
| 2. | Rosidah Maharani Alfi R. | (071911633034) |
| 3. | Alfito Nur Arafah | (071911633054) |
| 4. | Isnaeni Nur Fatimah | (071911633090) |
| 5. | Fatchorrahman Zain | (071911633094) |

MATA KULIAH WAJIB UMUM PANCASILA
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang bertema “Pancasila Sebagai Dasar Politik Luar Negeri Indonesia”.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila, selain itu makalah ini juga bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan baik kami sebagai penyusun maupun pembaca makalah ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Kadek Rachmawati, M.Kes., Drh selaku dosen mata kuliah wajib umum Pancasila yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari, makalah yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Surabaya, 6 Maret 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Bentuk dan Landasan Politik Luar Negeri Indonesia	4
2.2 Tindakan Pemerintah Dalam Melakukan Politik Luar Negeri Pada Era Globalisasi.....	6
2.3 Ancaman Yang Dihadapi Oleh Negara Indonesia Dalam Melakukan Politik Luar Negeri	6
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	7
3.2 Saran	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah situasi Perang Dunia Kedua, diketahui bahwa dunia terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Dimana Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan Blok Timur dipimpin oleh kekuatan Uni Soviet (Rusia). Kedua negara tersebut bersaing atau saling menunjukkan kekuasaan mereka, untuk dapat mempengaruhi negara-negara lainnya.

Dalam kondisi tersebut Indonesia memutuskan untuk menjadi pihak netral dimana mereka tidak memihak negara manapun. Sehingga pada posisi ini Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak mempunyai pendirian. Akibatnya kemudian Indonesia akan dimusuhi atau bahkan tidak akan dilindungi oleh negara-negara super power. Kemudian Mohammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia pada saat itu melakukan strategi politik bebas dan aktif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk dan landasan politik luar negeri yang dianut Indonesia?
2. Bagaimana tindakan pemerintah dalam melakukan politik luar negeri?
3. Bagaimana ancaman yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam politik luar negeri?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui landasan politik luar negeri negara Indonesia
2. Untuk mengetahui tindakan pemerintahan dalam melakukan politik luar negeri pada era globalisasi
3. Untuk mengetahui ancaman yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam melakukan politik luar negeri

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Bentuk dan Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia dikenal dengan politik bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia prinsip aktif dapat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat. Aktif di sini adalah suatu kegiatan yang terarah turut serta dalam kegiatan-kegiatan internasional yang menuju kepada terbentuknya ketertiban dunia. Yang mempunyai tiga unsur dasar yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan bebas yaitu bebas mengadakan hubungan dengan negara manapun dalam arti bebas menentukan sendiri sikap dan keputusan terhadap masalah-masalah internasional menurut nilai dan manfaatnya masing-masing tanpa mengikatkan diri kepada suatu blok.

Seperti halnya strategi, untuk mencapai tujuan negara, politik luar negeri Indonesia memiliki landasan yang mengatur dan memberikan arah serta pedoman dalam melaksanakan politik luar negerinya. Landasan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional.

1. Landasan idiil, dengan pengertian kata idiil sendiri berarti gagasan dasar bernegara atau falsafah kenegaraan. Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila yang berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. (Alami, 2008:28). Pancasila juga berkaitan dengan tujuan politik luar negeri Indonesia yang dikemukakan oleh Drs. Moh Hatta, yaitu mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan bangsa, memperoleh dari luar negeri barang-barang yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat, perdamaian internasional, dan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila (Hatta, 1953:6-7). Keterkaitan Pancasila dengan politik luar negeri Indonesia dapat dilihat dari setiap sila dari Pancasila, seperti yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengakui manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mempunyai martabat yang sama, tanpa memandang asal usul keturunan sebagai perwujudan pengakuan itu, bangsa Indonesia tidak menganut paham rasialisme dalam politik luar negerinya.

b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ideologi Pancasila sangat mengedepankan *sense of humanity*, menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang akan selalu menolak penindasan dari negara lain. Oleh karena itu bangsa Indonesia selalu aktif menentang segala bentuk penjajahan. Hal tersebut juga berarti dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia menerapkan unsur kesamarataan, rasa kemanusiaan yang tinggi, saling menghormati satu sama lain, dan tidak mengabaikan hak pihak lain.

c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai hal yang sangat

penting. Oleh karena itu politik luar negeri Indonesia harus tetap memperhatikan dan mengabdikan pada kepentingan nasional bangsa kita sendiri.

d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, hal tersebut menunjukkan pandangan bangsa Indonesia agar setiap masalah internasional diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga lebih mementingkan kedaulatan rakyat dari pada kedaulatan individu, contohnya sistem voting yang diajarkan pada paham liberalisme.

e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menunjukan pandangan bangsa yang menginginkan terwujudnya keadilan sosial yang berlingkup internasional dengan mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dalam tata pergaulan internasional.

2. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia terdapat pada UUD 1945 alinea pertama dan alinea keempat, serta pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13. Landasan konstitusional diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Dalam UUD 1945, terdapat pasal-pasal yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk garis besar kebijakan luar negeri Indonesia. Salah satu contoh landasan politik luar negeri Indonesia terdapat pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu “...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Hal tersebut berarti melalui politik luar negeri, Indonesia ikut berperan secara aktif dalam usaha menciptakan ketertiban dunia. Adanya hal-hal tersebut berfungsi dalam pelaksanaan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia (Alami, 2008:28).

3. Landasan operasional yang bersifat lebih dinamis, yaitu bebas-aktif. Menurut Hatta, politik “Bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Istilah “Aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok. (Mohammad Hatta, 1976:17). Operasional disini diartikan sebagai konsep dasar tujuan pengelolaan secara menyeluruh dari kehidupan nasional suatu negara. Namun, landasan operasional mengalami perluasan makna karena politik luar negeri Indonesia yang juga mengalami perkembangan (Alami, 2008:28-29). Oleh karena itu, dalam setiap periode, terjadi perubahan dalam politik luar negeri itu sendiri, tergantung pada pemerintah yang ada. Selain itu, landasan operasional juga selalu berubah-ubah karena pembuatannya yang terkait dengan kepentingan nasional yang saat itu ingin dicapai. Walaupun berubah-ubah, secara garis besar, landasan operasional politik luar negeri Indonesia tercantum dalam TAP MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dan pada akhirnya, terlepas dari pandangan subjektif masing-masing pemimpin Indonesia, politik luar negeri Indonesia harus tetap dijalankan dengan berlandaskan pada ketiga landasan tersebut.

Adanya ketiga landasan tersebut tidak berarti politik luar negeri Indonesia berjalan dengan mulus. Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, terdapat hambatan berupa kondisi politik internasional yang kacau dimana dunia terbagi menjadi dua kubu, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Akan tetapi, Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsipnya untuk tidak memihak blok manapun karena terdapat banyak alasan bagi Indonesia untuk tetap berdiri

sendiri. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia mengarah pada cita-cita PBB, yaitu perdamaian universal, walaupun dengan tidak menyandarkan diri pada salah satu blok besar pada masa itu. Meskipun demikian, Indonesia dianggap telah sukses melaksanakan politik luar negerinya.

2.2 Tindakan Pemerintah Dalam Melakukan Politik Luar Negeri Pada Era Globalisasi

Seiring berakhirnya Perang Dingin (*cold war*), banyak terjadi perubahan tatanan dalam hubungan politik luar negeri. Ideologi sudah tidak menjadi tolak ukur hubungan sebuah negara. Dengan begitu kerja sama akan menjadi semakin luas dan menjadikan banyak negara justru saling kebergantungan satu sama lain. Dengan semakin majunya zaman terjadinya revolusi elektronik yang menyebabkan adanya globalisasi. Globalisasi dapat dimaknai sebagai hal yang positif dan negatif. Disisi positif negara negara akan semakin erat hubungan satu sama lain, namun di sisi sebaliknya adalah *kolonialisme baru* yang diciptakan negara-negara maju yang berusaha memaksa budaya dan perilaku konsumtif.

Pada era yang telah modern ini pemerintah Republik Indonesia menggunakan menggunakan prinsip bebas dan aktif dan tetap berlandaskan pada Pancasila yang berarti Indonesia berhak menentukan sikapnya di dunia Internasional tanpa dipengaruhi campur tangan pihak lain, serta tetap berlandaskan pada nilai nilai yang tertuang pada Pancasila.

Dengan berlandasnya politik luar negeri Indonesia pada Pancasila, Indonesia lebih mengedepankan tindakan-tindakan yang bersifat diplomasi. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, optimalisasi pendekatan secara diplomatik merupakan sebuah prioritas utama. Pemerintah lebih mengedepankan *soft power* atau tindakan yang dilakukan secara baik-baik yaitu persuasif, pendekatan budaya, psikologis dan lain sebagainya, dengan begitu orang akan lebih menerima kita. Pendapat itu disampaikan SBY pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 2005.

2.3 Ancaman Yang Dihadapi Oleh Negara Indonesia Dalam Melakukan Politik Luar Negeri

Ada beberapa ancaman yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam melakukan politik luar Negeri, contohnya tindakan terorisme. Tindakan-tindakan terorisme ini memang menjadi salah satu ancaman politik dari luar negeri. Beberapa waktu yang lalu Indonesia digemparkan dengan aksi terorisme ini, banyak teroris yang tertangkap sebelum melaksanakan aksi jihatnya dengan cara meledakkan bom pada dirinya sendiri. Bisa dikatakan paham-paham radikal tersebut datang dari luar negeri dan kemudian Indonesia menjadi target akan tindak terorisme dengan tujuan untuk beberapa hal mulai dari mengganti ideologi Indonesia.

Ancaman yang selanjutnya, yaitu negara lain terlalu ikut campur urusan negara. Adanya campur tangan dari negara lain ini tentu saja sangat berbahaya bagi negara karena dapat merongrong kedaulatan Bangsa Indonesia, mengapa demikian? karena negara lain tentu saja memiliki kepentingan tersendiri dibalik campur tangannya tersebut. Oleh sebab itu negara lain dilarang untuk ikut terlibat dalam urusan negara yang dapat menyebabkan timbulnya hasutan untuk memecah belah hingga menimbulkan konflik vertikal yang menyebabkan perang saudara. Untuk menjaga kedaulatan negara, maka dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) telah diatur bahwa negara berhak menentukan nasib dan urusan bangsa secara individu tanpa adanya campur tangan dari pihak asing tanpa terkecuali.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Setelah perang dunia ke II, dunia terbagi menjadi 2 blok yaitu blok barat dan blok timur dimana masing - masing blok saling bersaing atau saling menunjukkan kekuasaan mereka. Dalam kondisi tersebut, indonesia memutuskan berada dipihak netral dan melakukan strategi politik bebas dan aktif. Politik bebas aktif indonesia memiliki 3 landasan untuk mengatur dan menjadi pedoman dalam menjalankan politik luar negerinya. Namun, di era globalisasi ini politik luar negeri indonesia mengalami berbagai macam kendala yang harus dihadapi. Walaupun demikian politik luar negeri indonesia dapat berjalan dengan baik dengan berlandaskan pada ideologi bangsa indonesia yaitu pancasila. Selain itu, dalam menjalankan politik luar negeri pastinya memiliki ancaman baik dari dalam maupun luar. sebagai contohnya yaitu terorisme yang dilakukan oleh pihak luar yang berpaham radikal. Pengaruh dari pihak luar juga menjadi ancaman bagi politik luar negeri indonesia karena dapat memecah belah dan dapat menimbulkan konflik vertikal.

3.2 Saran

Langkah dan sifat yang telah ditularkan oleh negara Indonesia bagi dunia internasional seharusnya dapat menjadi contoh nyata bahwa semuanya dapat diselesaikan dengan langkah yang baik-baik, tidak semua permasalahan harus dilakukan dengan tindakan fisik dan bersifat memaksa. Bagi pemerintah Indonesia, diperlukan suatu tindakan pencegahan terhadap manufer politik luar negeri memperketat kerjasama dengan negara negara sahabat contohnya. Langkah selektif dalam menjalin kerja sama dengan suatu negara juga akan mencegah suatu manufer politik yang membahayakan kestabilan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Windiani, Reni, 2010. *POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN GLOBALISASI*. POLITIKA Jurnal Ilmu Politik, Vol. I, No. 2, hlm. 88-97.

Lukum, Roni, 2013. *Peran Ideologi Pancasila dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia sebagai Solusi Menghadapi Pengaruh Globalisasi*. Universitas Negeri Gorontalo.

Hatta, Mohammad. 1953. *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. Jakarta: Tintamas, hlm. 1-31.

Alami, Atiqah Nur. 2008. "Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia", dalam Ganewati Wuryandari (ed.), 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar, hlm. 26-59.

Situmorang, Mangadar. 2014. *Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK*. Universitas Katolik Parahyangan.